

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG YANG
DIPENGARUHI OLEH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN IMPLEMENTASI
PENGENDALIAN INTERNAL**

(Survey Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)

**REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY ON BANDUNG CITY GOVERNMENT AFFECTED BY
IMPLEMENTATION OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS AND IMPLEMENTATION INTERNAL
CONTROL**

(Survey on Regional Work Unit of Bandung City Government)

Pembimbing :

Dr. Ony Widilestariningtyas, S.E., M.Si., Ak., CA.

Oleh :

Rafika Triana

21115177

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2019**

Email : rafikatriana2@gmail.com

ABSTRACT

Accountability of regional financial management is the responsibility for the application and implementation of regional financial management in order to achieve the stated goals. The opinion given on government financial reports is a reflection of the quality of accountability in regional financial management. This research was conducted to discuss the importance of implementing the regional financial system and internal implementation of regional financial management accountability.

The research method used is a descriptive verification analysis method with an analysis unit that discusses the Head of Financial Affairs, and the Finance Section in the work unit of the Bandung City Regional Government. The sample used in this study amounted to 16 regional work units consisting of 55 respondents.

The results of this study are the implementation of a regional financial system that is significant to the accountability of regional financial management in the city of Bandung and the implementation of significant internal control over the accountability of regional financial management in the work units of the regional government in Bandung.

Keywords: Accountability of Regional Financial Management, Implementation of Regional Financial Accounting Systems, and Implementation of Internal Control.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pengelolaan keuangan negara (Marja Sinurat, 2018:1). Pada dasarnya, pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam mengukur kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah dan kapabilitas organisasi Pemerintah daerah, yaitu Pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (Marja Sinurat, 2018:1). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip dan asas pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Marja Sinurat, 2018:1).

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat pengelola maupun pengguna anggaran secara terbuka dan dapat dinilai oleh publik (*accountabilities public*) (Hendra Karianga, 2017:42).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, kegiatan penatausahaan, kegiatan pertanggungjawaban, serta kegiatan pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Abdul Halim, 2012:27). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui

pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan Pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat (Abdul Halim, 2012:27). Agar terciptanya hal itu ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan (Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofianti, 2017:48).

Permasalahan yang terjadi terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung yaitu rendahnya pertanggungjawaban proses dalam menemukan data, untuk data seperti catatan piutang pajak (Tedy Gustiana, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung yang dipengaruhi oleh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Implementasi Pengendalian Internal”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Seberapa besar pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
- 2) Seberapa besar pengaruh Implementasi Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis besarnya pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
- 2) Untuk menganalisis besarnya pengaruh Implementasi Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Daerah
Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian internal agar menghasilkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuannya.
- 2) Bagi Regulator
Diharapkan dapat memberikan tambahan referensi mengenai hubungan antara implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan implementasi pengendalian internal dengan

hasil penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan regulasi di masa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Akademik

- 1) Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi
Diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi.
- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan maupun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai implementasikan sistem akuntansi keuangan daerah dan implementasikan pengendalian internal dengan hasil penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Deddi Noerdiawan dan Ayuningtyas Hertanti (2014:201), sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau aplikasi komputer. Indikator yang digunakan menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:99) meliputi:

- 1) Pencatatan
- 2) Pengikhtisaran
- 3) Pelaporan

2.1.2 Pengendalian Internal

Menurut Faiz zamzami, Mukhlis, Anissa Eka Pramesti (2018:76-79), pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan peraturan perundang - undangan mengacu pada unsur yang meliputi, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan”. Indikator yang digunakan menurut Faiz zamzami, Ihda Arifin Faiz dan Mukhlisin (2018:76-79) meliputi:

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penilaian resiko
- 3) Aktivitas pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Pemantauan

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Yoyo Sudaryo Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofianti (2017:48), akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang

menyangkut pertanggungjawaban hukum dan kejujuran, proses, program dan kebijakan. Indikator yang digunakan menurut Yoyo Sudaryo Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofianti (2017:48):

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran
- 2) Akuntabilitas proses
- 3) Akuntabilitas program
- 4) Akuntabilitas kebijakan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2004:5), agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, adil, efektif, efisien. Dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diharapkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan dapat tercapai (Abdul Halim 2004:5).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Magdalena Hesti Kurniawati (2016), yang membuktikan bahwa semakin tinggi sistem akuntansi keuangan daerah maka secara otomatis akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.2.2 Pengaruh Implementasi Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dibutuhkan adanya pengendalian internal yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan Abdul Halim (2004:258).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirza Masyhur (2017), yang membuktikan bahwa dengan adanya pengendalian internal yang baik akan memberikan aturan yang baik dan jelas dalam tubuh SKPD sehingga sistem yang ada didalam pengelolaan keuangan jadi lebih terstruktur dan baik, sehingga akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.

2.3 Hipotesis

H_1 : Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

H_2 : Implementasi Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

III. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid guna untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2017:2).

3.2 Operasional Variabel

Umi Narimawati (2010:30) menjelaskan pengertian operasionalisasi variable adalah proses penguraian variabel penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) implementasi pengendalian internal (X_2) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini sebanyak 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 55 orang responden yang terdapat pada 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Uji Validitas

Butir instrumen dikatakan valid jika nilai koefisien validitas $\geq 0,3$. Hasil uji validitas ditunjukkan pada tabel 4.1

4.1.2 Reabilitas

Butir instrumen dinyatakan reliabel jika memiliki koefisien reabilitas $\geq 0,7$. Hasil uji reabilitas ditunjukkan pada tabel 4.2

4.1.3 Hasil Analisis Deskriptif

1) Analisis Deskriptif Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil rekapitulasi tanggapan responden terkait variabel pengelolaan keuangan daerah, memiliki skor sebesar 69.09% dengan kriteria baik, namun masih terdapat kelemahan karena terdapat gap sebesar 30.91%. Hal ini menunjukkan masih ada kelemahan dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah khususnya pada indikator pencatatan.

2) Analisis Deskriptif Implementasi Pengendalian Internal

Hasil rekapitulasi tanggapan responden terkait variabel implementasi pengendalian internal memiliki skor 68.80% dengan kriteria baik, namun masih terdapat kelemahan karena terdapat gap sebesar 31.20%. Hal ini menunjukkan masih ada kelemahan dalam implementasi pengendalian internal khususnya pada indikator aktivitas pengendalian.

3) Analisis Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil rekapitulasi tanggapan responden terkait variabel kinerja pemerintah daerah memiliki skor sebesar 71.36% namun masih terdapat kelemahan karena terdapat gap sebesar 28.64%. Hal ini

menunjukkan masih ada kelemahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya pada indikator akuntabilitas proses.

4.1.4 Hasil Analisis Verifikatif

1) Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

1. Uji Validitas

a. *Convergent Validity*

Indikator dari suatu konstruk hasil memiliki nilai korelasi yang tinggi, maka dapat dilihat dari nilai outer loading pada setiap indikator. Nilai outer loading harus lebih dari 0,7 untuk dikategorikan tinggi (Imam Gozali, 2013:110). *The rule of thumb is that average variance extracted (AVE) should be more than 0,5* (Fransisco Jose dan Garcia Penalvo, 2018:264). Hasil uji *convergent validity* ditunjukkan pada tabel 4.3 dan 4.4

b. *Discriminan Validity*

Discriminan validity dilihat dari nilai *cross loading factor* dan perbandingan nilai *ave* dengan korelasi antar variabel. Hasil uji *discriminan validity* ditunjukkan tabel 4.5

2. Reabilitas

Nilai *composite reability* harus lebih besar ≥ 0.7 . Hasil uji reabilitas ditunjukkan pada tabel 4.6

3. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Dalam penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan nilai *path coefficient* dan *t-values*, dapat dilihat pada tabel 4.7

4. Pengujian Hipotesis

untuk melihat pengaruh variabel X_1 dan X_2 terhadap Y , dapat dilihat pada tabel 4.8 dan 4.9

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh sebesar 35,55% terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,768 yang berarti implementasi sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh yang sangat kuat arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung. Demikian bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang semakin baik akan diikuti dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik pula, sedangkan sisanya 64.45% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu menurut Handri, Y.P dkk (2014) yang mengungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dirancang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan, dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik akan mendukung

terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah..

4.2.2 Pengaruh Implementasi Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengendalian internal berpengaruh sebesar 27.93% terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,753 yang berarti implementasi pengendalian internal memberikan pengaruh yang sangat kuat arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung. Demikian menunjukkan bahwa implementasi pengendalian internal yang semakin baik akan diikuti dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik pula, sedangkan sisanya 72.07% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putu Riana Primayani. Nyoman Trisna Herawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) yang mengungkapkan bahwa dengan pengendalian internal semakin meningkat maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD yang terdapat di Kabupaten Klungkung akan semakin meningkat pula.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

- 1) Implementasi sistem akuntansi keuangan berpengaruh sangat kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung. Artinya apabila implementasi sistem akuntansi keuangan daerah sangat baik maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan mengalami peningkatan.
- 2) Implementasi pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung. Artinya apabila implementasi pengendalian internal meningkat maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

- 1) Agar implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka pegawai keuangan dalam melakukan pencatatan harus selalu didukung bukti transaksi, selain itu pula pegawai perlu mengikuti dengan baik standar operasional pelaksanaan pencatatan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, dan untuk menumbuhkan sikap ketelitian pegawai harus sering melakukan pelatihan. Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan menjadi lebih baik.

- 2) Agar implementasi pengendalian internal dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk mengatasi masalah aktivitas pengendalian dilakukan dengan cara meningkatkan aktivitas pengendalian berupa pemisahan fungsi untuk menghindari adanya resiko dokumen pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan menjadi lebih baik

5.2.2 Saran Akademis

1) Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait analisa atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan implementasi pengendalian internal, serta sebagai masukan bagi para pembaca.

2) Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Deddi Noerdiawan dan Ayuningtyas Hertanti. 2014. Akuntansi sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Dwi Ratmono, Mahfud Sholihin. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. cetakan pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Faiz Zamzami, Ihda Arifin Faiz, Mukhlis. 2018. Audit Internal, Konsep dan Praktik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Faiz Zamzami, Mukhlis, Anissa Eka Pramesti. 2018. Audit Keuangan Sektor Publik Untul Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Fransisco Jose dan Garcia Penalvo. 2018. Global implication of emerging Technology Trends. United States of Amerika: IGI Global

Handri, Y.P., Rifa, D., dan Rahmawati, N. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Posisi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Jurnal, Universitas Bung Hatta.

Hendra Karianga. Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Prenada Media.

Imam Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Maria Magdalena Hesti Kurniawati. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember). Artikel Ilmiah Mahasiswa.

Marja Sinurat. 2018. Akuntansi Keuangan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mirza Masyhur. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Kota Dumai. JOM Fekon, Vol. 4 No.1 (Februari). ISSN 2355-6854.

Putu Riana Primayani. Nyoman Trisna Herawati, Nyoman Ari Surya Darmawan, 2014. Pengaruh Pengendalian Internal, Value For Money, Penyajian Laporan Keuangan dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1 Vol 2, No 1.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Umi Narimawati, dkk. 2010. Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir. Jakarta: Genesis.

Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofianti. 2017. Keuangan Di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: ANDI.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas Instrumen

Variabel	No. Item	Koefisien Validitas	Nilai Kritis	Kesimpulan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₁)	1	0.857	0,3	Valid
	2	0.858	0,3	Valid
	3	0.811	0,3	Valid
Pengendalian Internal (X ₂)	4	0.736	0,3	Valid
	5	0.743	0,3	Valid
	6	0.791	0,3	Valid
	7	0.836	0,3	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	8	0.832	0,3	Valid
	9	0.700	0,3	Valid
	10	0.820	0,3	Valid
	11	0.857	0,3	Valid
	12	0.804	0,3	Valid

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019

Tabel 4.2
Rekapitulasi Hasil Pengujian Reliabilitas Kuesioner

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Nilai Kritis	Kesimpulan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₁)	0.747	0,7	Reliabel
Pengendalian Internal (X ₂)	0.893	0,7	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.778	0,7	Reliabel

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019

Tabel 4.3
Loading Factor

	X1	X2	Y
x1.1	0,861863		
x1.2	0,874847		
x1.3	0,786923		
x2.1		0,747339	
x2.2		0,708497	
x2.3		0,801876	
x2.4		0,845706	
x2.5		0,826501	
y1			0,758906
y2			0,836493
y3			0,814532
y4			0,776520

Sumber: Data diolah menggunakan software Smart PLS

Tabel 4.4
AVE

	AVE	Comunalty
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₁)	0.708614	0.708614
Pengendalian Internal (X ₂)	0.620362	0.620362
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.635108	0.635108

Sumber: Data diolah menggunakan software Smart PLS

Tabel 4.5
Cross Loading Factor

	X1	X2	Y
x1.1	0,861863	0,689753	0,708289
x1.2	0,874847	0,710132	0,685167
x1.3	0,785923	0,693237	0,527035
x2.1	0,625371	0,747339	0,596109
x2.2	0,574416	0,708497	0,393094
x2.3	0,656200	0,801876	0,643875
x2.4	0,657205	0,845705	0,653681
x2.5	0,729425	0,826501	0,619951
y1	0,616436	0,638908	0,758905
y2	0,700847	0,706172	0,835493
y3	0,528152	0,487023	0,814532
y4	0,576309	0,526972	0,776520

Sumber: Data diolah menggunakan software Smart PLS

Tabel 4.6
Composite Reliability

	Composite Reliability
X1	0,879224
X2	0,890547
Y	0,874247

Sumber: Data diolah menggunakan software Smart PLS

Tabel 4.7
Nilai Koefisien Jalur Struktural dan Uji Signifikansi Hipotesis (Path Coefficients)

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STERR)
Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₁) -> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,462649	4,174262
Implementasi Pengendalian Internal (X ₂) -> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,371154	3,725939

Sumber: Data diolah menggunakan software Smart PLS

Tabel 4.8
Uji t Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁) terhadap
Akuntabilitas Pengellaan Keuangan Daerah(Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	t _{statistik}	t _{critis}	Keterangan	Kesimpulan
X ₁ -> Y	0.463	4.174	1.96	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan software PLS

Tabel 4.9
Uji t Pengendalian Internal (X₂) terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah(Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	t _{statistik}	t _{critis}	Keterangan	Kesimpulan
X ₂ -> Y	0,371	3.726	1.96	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan software PLS